**UTS MANAJEMEN STRATEGI**

**“PENDEKATAN *FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD)* DALAM MENENTUKAN ISU-ISU STRATEGIS PADA PEMBANGUNAN DAERAH”**

**Disusun Oleh :**

**Bella Aulia Salsabilla**

**(2156041021)**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung, 2023

**ABSTRAK**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan dengan analisis isu-isu strategis dan permasalahannya dalam pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk meneliti fenomena-fenomna sosial. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Pemerintah sendiri juga memiliki peran dimana menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

**Kata Kunci:** FGD, Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan

**A. PENDAHULUAN**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Dalam pembangunan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa visi pembangunan adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. RPJMN 2015-2019 ini merupakan tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.Visi tersebut yang dijadikan pedoman dalan penyusunan setiap perencanaan pembangunan pada kurun waktu tersebut, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang juga terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan. Oleh karena itu dalam perumusan permasalahan dan isu strategis perlu adanya masukan dari stakeholder kabupaten/kota, provinsi dan nasional agar diperoleh konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional/Provinsi yang bersifat mandatory.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Suyitno dalam Ratnaningtyas dkk (2022), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti fenomena-fenomna sosial dan budaya yang berkaitan dengan perilau manusia yang sulit diukur dengan angka. Kemudian analisis data dilakukan dengan data yang berasal dari dokumen-dokumen dan jurnal terkait materi Pendekatan Focus Grup Discussion Dalam Menentukan Isu Isu Strategis Dalam Pemerintah Daerah.

**C. HASIL**

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

Adapun Sumber data permasalahan yang terdiri dari: Perbandingan Data Capaian Kinerja antar tahun, Perbandingan Data Capaian dengan antar daerah, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Pokok Pikiran Dewan, Diskusi dengan Kelompok Masyarakat (Gapoktan, Aliansi Masyarakat, dst), Kajian Akademis, Data dan Fakta yang terjadi, dan Kajian dan Press Release BPS. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok sendiri merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal – hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan.

**D. PEMBAHASAN**

Pada perspektif sosial, ada beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam hasil dari Pembangunan Daerah adalah;

1. Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial yang meliputi aspek rehabilitasi sosial dasar maupun lanjutan, perlindungan dan jaminan sosial seperti pada anak terlantar, anak disabilitas/berkebutuhan khusus, lansia terlantar, tuna sosial dan penanganan bencana alam maupun sosial.
2. Belum optimalnya sebuah peranan dalam pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
3. Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan masih kurang, disebabkan belum Optimalnya Penanganan Fakir Miskin dan kurangnya Akurasi Data Kemiskinan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Tersusunnya visi tersebut dilatarbelakangi dari adanya Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu (1) Reformasi Birokrasi; (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) Budaya Kreatif Inovatif; (5) Kesetaraan dan Keadilan Gender; (6) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (7) Krisis Pangan dan Air; (8) Krisis Energi; (9) Kerjasama Antar Daerah; dan (10) Penguatan Wilayah Tertinggal dan Kapasitas Masyarakat.

Dalam menentukan pembobotan isu – isu pembobotan dilakukan *Focus Grup Discussion* (FGD) untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi. Dengan melihat potensi, masalah, dan tantangan tersebut, peran perencanaan pembangunan nasional dan daerah menjadi penting.

FGD dilaksanakan sebagai salah satu bentuk dalam melakukan pendekatan secara partisipatif, dimana perumusan isu-isu strategis melalui pendekatan teknokratis juga melalui pendekatan pastisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tujuan FGD adalah dalam rangka menjaring isu-isu strategis baik lokal, regional, nasional dan global dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun) kedepan, yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya pada tingkat daerah. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasil pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**E. KESIMPULAN**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa dating. Dengan mengidentifikasi beberapa sumber data, pemerintah memiliki peran dalam menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

FGD disini memiliki peran untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan/responden dalam hal untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis.

Perumusan isu strategis RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai sumber diantaranya yaitu permasalahan Pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi Pembangunan Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

D Djadjuli. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Aministrasi Negara.* Jawa Barat.

Kuncoro Mudrajat. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ratnaningtyas, E. M., Dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*

Nastolio, Gefri Berland. (2022). *Kinerja Bappelitbang Dalam Sinkronisasi Visi Dan Misi Pembangunan Berdasarakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*.

Rasyid Ryaas. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ulum, M. Chazienul. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoristis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik.* Malang: UB Press.